

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kubu Raya



TH.C.LEYDIANTO, S.IP, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP 19630623 198503 1 010

DAFTARISI

DAFTARISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	I
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021.....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021.....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	II-19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-12
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-27
BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM, DAN KEGIATAN	III.1
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kabupaten.....	III-1
3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-2
3.3.Program dan Kegiatan.....	III-5
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
BAB V PENUTUP.....	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023

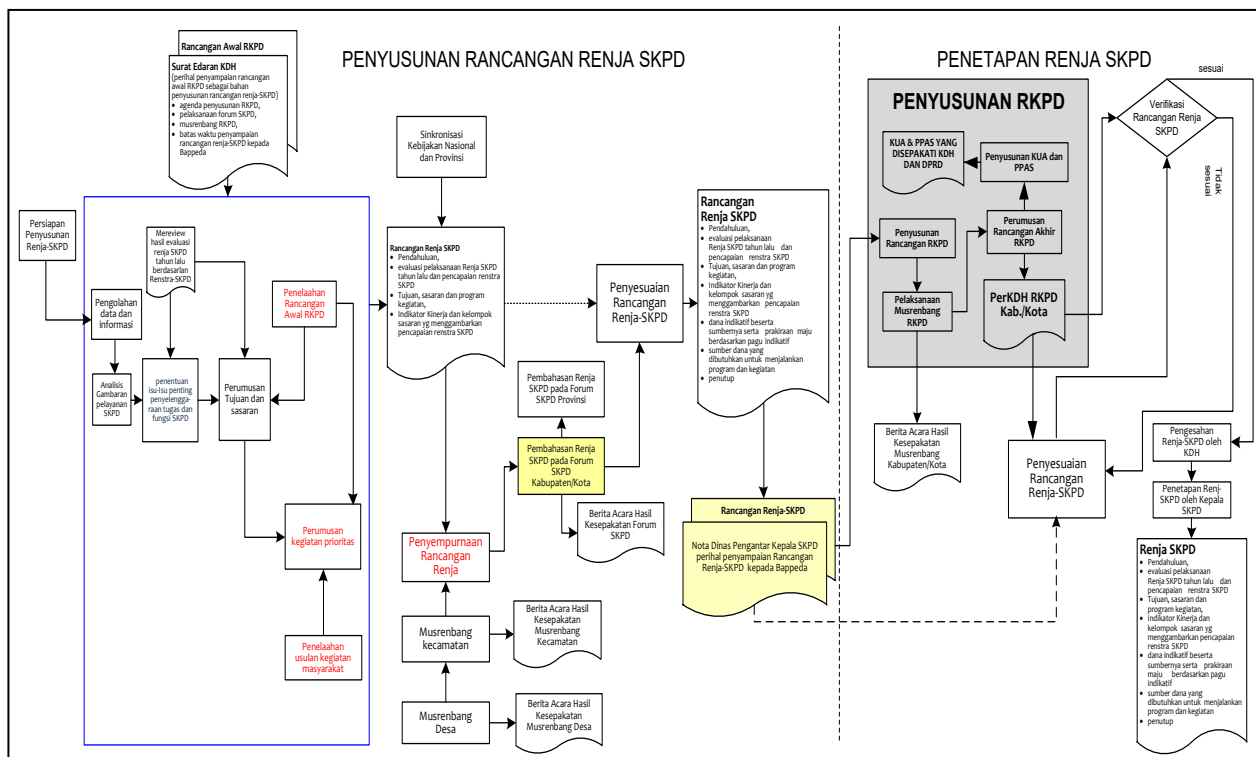
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang perencanaan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (LN.2003/47, TLN NO.4286);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (LN. 2008/2, TLN NO. 4801) Sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2011 tentang perubahan atas UU 2/2008 tentang Partai Politik (LN 2011/8, TLN 5189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
7. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (LN.2020/No.245, TLN No.6573);
8. Undang-undang Nomor 9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat. (LN.2022/No.69, TLN No.6780);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional. (LN. 2017/No.105, TLN No.6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (LN.2017/No. 225, TLN NO.6133);
11. Peraturan pemerintah 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (LN.2019/NO.42, TLN NO.6322);
12. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (LN.2019/NO.52, TLN NO.6323);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. (LN.2020/NO.10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. (BN.2019/1447);
16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (BN 2020/ NO 288);
17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (BN.2020/No.1781);
18. Perda 81 2022

19. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. (LD.2016/NO.3, TLD NO.3);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023. (LD.2019/NO.2);
22. **PERGUB Kalimantan Barat 42 tahun 2022;**
23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang RPJP Kabupaten Kubu Raya. (LD.2009/NO.16);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (LD.2016/NO.6, TLD NO.6);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024. (LD.2019/NO.5);
26. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kubu Raya.

1.3 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Sebagai pedoman dan arah bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Rencana Strategis Bakesbangpol Tahun 2019 - 2024.

B. Tujuan

Memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai unsur penunjang pemerintah kabupaten Kubu Raya dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD , RPJMD, dan RKPD, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja BAKESBANGPOL yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAKESBANGPOL TAHUN 2021

Bab ini menggambarkan hasil realisasi dan usulan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sub bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional berdasarkan RKP Tahun 2023.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 – 2024. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target Tahun 2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Sub Bab ini memuat program dan kegiatan yang diuraikan secara garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan.
2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Program serta Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BANKESBANGPOL TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bankesbangpol Tahun 2021 dan Capaian Renstra Bankesbangpol

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2021 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2023. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya mendapat alokasi anggaran **Rp. 6.239.715.017,00** dengan realisasi sebesar **Rp6.239.715.017,00** atau sebesar **100%** yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 4.080.251.251,00** dengan Realisasi **Rp. 4.080.251.251,00** atau **100%** dan Belanja Langsung **Rp. 2.159.463.766** dengan Realisasi sebesar **Rp. 2.159.463.766,00** atau **100%**.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan /Bidang Umum Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/5	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah.	19.307.650	5.554.250	2.334.500	2.334.500	42	6.260.000	14.148.750	73
1	4	03	1	1	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.	Jumlah Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.	12.603.000	0	2.935.500	2.935.500	-	6.886.000	9.821.500	78
1	4	03	1	2	Sistem Informasi Perencanaan SKPD.	Jumlah Informasi Perencanaan SKPD.	15.317.750	2.334.500	3.324.500	3.324.500	142	6.886.000	12.545.000	82
2					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Indikator Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	2.364.497.070	314.924.500	791.508.700	791.508.700	251	870.659.570	1.977.092.770	84
2	4	01	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat.	223.680.800	52.948.000	56.088.000	56.088.000	106	61.696.800	170.732.800	76
2	4	01	1	2	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Jumlah jasa administrasi keuangan.	80.308.850	3.612.000	34.224.000	34.224.000	948	37.646.400	75.482.400	94
2	4	01	1	3	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jumlah jasa kebersihan kantor.	82.185.600	26.745.600	26.400.000	26.400.000	99	29.040.000	82.185.600	100
2	4	01	1	4	Penyediaan alat tulis kantor.	Jumlah alat tulis kantor.	102.926.270	2 3.418.900	37.881.700	37.881.700	162	41.669.870	102.970.470	100
2	4	01	1	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah barang cetakan dan penggandaan.	12.190.750	1.840.000	4.290.000	4.290.000	233	4.719.000	10.849.000	89
2	4	01	1	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	18.480.000	3.600.000	4.800.000	4.800.000	133	5.280.000	13.680.000	74
2	4	01	1	7	Penyediaan makan dan minuman.	Jumlah makan dan minuman.	58.110.000	9.360.000	19.500.000	19.500.000	208	21.450.000	50.310.000	87
2	4	01	1	8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah.	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah.	1.110.872.500	110.000.000	379.725.000	379.725.000	345	417.697.500	907.422.500	82

2	4	01	1	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kedalam Daerah.	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kedalam Daerah.	442.008.000	60.000.000	151.200.000	151.200.000	252	166.320.000	377.520.000	85
2	4	01	1	10	Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP).	Jumlah Dokumen Standard Operasional Prosedur (SOP).	975.400	0	0	0	-	0	0	0
2	4	01	1	11	Pemeliharaan Listrik dan Penambahan Daya.	Pemeliharaan Listrik dan Penambahan Daya.	209.340.000	23.400.000	77.400.000	77.400.000	331	85.140.000	185.940.000	89
3					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.	Indikator Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.	1.393.404.900	180.539.400	514.785.000	514.785.000	285	566.263.500	1.261.587.900	91
3	4	01	1	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Jumlah perlengkapan gedung kantor.	0	0	0	0	-	0	0	-
3	4	01	1	2	Pengadaan peralatan gedung kantor.	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor.	282.256.000	31.057.000	110.190.000	110.190.000	355	121.209.000	262.456.000	93
3	4	01	1	3	Pengadaan mebel.	Jumlah mebel.	444.016.500	6.050.000	203.595.000	203.595.000	3365	223.954.500	433.599.500	98
3	4	01	1	4	Sewa gedung kantor.	Gedung kantor.	453.158.450	96.533.450	130.000.000	130.000.000	135	143.000.000	369.533.450	82
3	4	01	1	5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	18.694.000	3.572.000	5.500.000	5.500.000	154	6.050.000	15.122.000	81
3	4	01	1	6	Pemeliharaan rutin/berkala komputer.	Jumlah pemeliharaan komputer.	17.990.950	3.326.950	5.500.000	5.500.000	165	6.050.000	14.876.950	83
3	4	01	1	7	Pengadaan kendaraan dinas/operasional.	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional.	166.000.000	40.000.000	60.000.000	60.000.000	150	66.000.000	166.000.000	100
3	4	01	1	8	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Oprasional.	Jumlah pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Oprasional.	11.289.000	0	0	0	-	0	0	0
4					Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Indikator Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	33.150.000	6.000.000	11.500.000	11.500.000	192	12.650.000	30.150.000	91
4	4	05	1	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya.	33.150.000	6.000.000	11.500.000	11.500.000	192	12.650.000	30.150.000	91
4	4	05	1	2	Pengadaan pakaian olahraga.	Jumlah pakaian olahraga.	0	0	0	0	-	0	0	-
4	4	05	1	3	Pengadaan pakaian batik.	Jumlah pakaian batik.	0	0	0	0	-	0	0	-
5					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya.	Indikator Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	369.700.000	99.450.000	110.500.000	110.500.000	111	121.550.000	331.500.000	90
5	4	05	1	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	369.700.000	99.450.000	110.500.000	110.500.000	111	121.550.000	331.500.000	90
5	4	05	1	2	Diklat Intelijen Dasar, Lanjutan dan Tim Fasilitasi Pembauran Kebangsaan dan Diklat Keuangan.	Diklat Intelijen Dasar, Lanjutan dan Tim Fasilitasi Pembauran Kebangsaan dan Diklat Keuangan.	0	0	0	0	-	0	0	-
5	4	05	1	3	Penyusunan Analisis Jabatan SKPD.	Jumlah dokumen Evaluasi Jabatan SKPD.	0	0	0	0	-	0	0	-
5	4	05	1	4	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD.	Jumlah dokumen Evaluasi Jabatan SKPD.	0	0	0	0	-	0	0	-
6					Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Indikator Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	81.798.650	15.964.000	16.175.500	16.175.500	101	17.793.050	49.932.550	61

					Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.	Capaian Kinerja Dan Keuangan.								
6	4	01	1	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.	Jumlah dokumen capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.	27.746.700	2.404.000	2.527.000	2.527.000	105	2.779.700	7.710.700	28
6	4	01	1	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran.	Jumlah dokumen keuangan semesteran.	11.278.150	2.582.000	2.670.500	2.670.500	103	2.937.550	8.190.050	73
6	4	01	1	3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun.	11.951.400	2.684.000	2.684.000	2.684.000	100	2.952.400	8.320.400	70
6	4	01	1	4	Penyusunan LPPD SKPD.	Jumlah dokumen LPPD SKPD.	7.105.200	2.292.000	2.292.000	2.292.000	100	2.521.200	7.105.200	100
6	4	01	1	5	Penyusunan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-DPA-DPPA) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-DPA-DPPA) SKPD	23.717.200	6.002.000	6.002.000	6.002.000	100	6.602.200	18.606.200	78
6	4	01	1	6	Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian (DUK, DP3, LP2P dan SDM) SKPD.	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian (DUK, DP3, LP2P dan SDM) SKPD.	0	0	0	0	-	0	0	-
7					PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah Prongram Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	3.997.993.700	180.426.500	1.730.496.000	1.730.496.000	959	1.903.545.600	3.814.468.100	95
7	1	05	1	1	Fasilitasi Koordinasi Peran dan Fungsi FKUB	Jumlah Agar dalam menjalankan ajaran agama dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan damai	958.872.910	97.862.200	365.487.100	365.487.100	373	402.035.810	865.385.110	90
7	1	05	1	2	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	326.116.700	41.479.400	114.508.000	114.508.000	276	125.958.800	281.946.200	86
7	1	05	1	3	Imlementasi Penyuluhan Bela Negara	Jumlah Imlementasi Penyuluhan Bela Negara	135.584.900	41.084.900	45.000.000	45.000.000	110	49.500.000	135.584.900	100
7	1	05	1	4	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	291.374.100	0	116.908.000	116.908.000	-	128.598.800	245.506.800	84
7	1	05	1	5	Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	111.763.890	0	53.220.900	53.220.900	-	58.542.990	111.763.890	100
7	1	05	1	6	Pemantapan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pemantapan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan	245.506.800	0	116.908.000	116.908.000	-	128.598.800	245.506.800	100
7	1	05	1	7	Penigkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Kebangsaan	Jumlah Data-data Ormas dan LSM	245.506.800	0	116.908.000	116.908.000	-	128.598.800	245.506.800	100
7	1	05	1	8	Dialog Lintas Agama di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Dialog Lintas Agama di Kabupaten Kubu Raya	240.466.800	0	114.508.000	114.508.000	-	125.958.800	240.466.800	100
7	1	05	1	9	Penguatan Kapasitas Tokoh Agama Perempuan di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Penguatan Kapasitas Tokoh Agama Perempuan di Kabupaten Kubu Raya	240.466.800	0	114.508.000	114.508.000	-	125.958.800	240.466.800	100
7	1	05	1	10	Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Kubu Raya	240.466.800	0	114.508.000	114.508.000	-	125.958.800	240.466.800	100
7	1	05	1	11	Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Ketahanan Sosial Budaya di Kabupaten Kubu Raya	240.466.800	0	114.508.000	114.508.000	-	125.958.800	240.466.800	100
7	1	05	1	12	Monitoring Kekayaan Budaya Daerah	Jumlah Monitoring Kekayaan Budaya Daerah	240.466.800	0	114.508.000	114.508.000	-	125.958.800	240.466.800	100
7	1	05	1	13	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Pelajar dan Mahasiswa	Jumlah Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Pelajar dan Mahasiswa	240.466.800	0	114.508.000	114.508.000	-	125.958.800	240.466.800	100
7	1	05	1	14	Ravitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila	Jumlah Ravitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila	240.466.800	0	114.508.000	114.508.000	-	125.958.800	240.466.800	100
8					PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Jumlah Prongram Pendidikan Politik Masyarakat	644.442.300	85.485.200	228.516.000	228.516.000	267	251.367.600	565.368.800	88
8	1	05	1	1	Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Terwujudnya Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik	37.041.000	8.020.500	10.000.000	10.000.000	125	11.000.000	29.020.500	78
8	1	05	1	2	Fasilitasi Pembinaan Partai Politik	Tertata Susunan Kepengurusan Parpol	92.815.500	14.509.000	30.000.000	30.000.000	207	33.000.000	77.509.000	84
8	1	05	1	3	Fasilitasi Perizinan Reklame Non Komersial	Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi di Masyarakat	30.185.600	7.142.500	10.000.000	10.000.000	140	11.000.000	28.142.500	93

8	1	05	1	4	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Politik Dalam Negeri	Terjadinya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Politik Dalam Negeri	307.813.200	55.813.200	120.000.000	120.000.000	215	132.000.000	307.813.200	100
8	1	05	1	5	Pemetaan Situasi Kondisi Unsur-unsur yang mempengaruhi Politik Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Kubu Raya	Terlaksananya Pemetaan Situasi Kondisi Unsur-unsur yang mempengaruhi Politik Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Kubu Raya	30.720.900	0	14.629.000	14.629.000	-	16.091.900	30.720.900	100
8	1	05	1	6	Peningkatan Pemahaman Demokrasi yang Berdasarkan Pancasila	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman Demokrasi yang Berdasarkan Pancasila	30.720.900	0	14.629.000	14.629.000	-	16.091.900	30.720.900	100
8	1	05	1	7	Pelaksanaan dan Fasilitas Pendidikan Politik di Wilayah Kabupaten Kubu Raya	Terlaksananya Pelaksanaan dan Fasilitas Pendidikan Politik di Wilayah Kabupaten Kubu Raya	30.720.900	0	14.629.000	14.629.000	-	16.091.900	30.720.900	100
8	1	05	1	8	Sosialisasi Undang - Undang Pemilu	Terlaksananya pemahaman terhadap pemilu	0	0	0	0	-	0	0	-
8	1	05	1	9	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya Politik di Kabupaten Kubu Raya	Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya Politik di Kabupaten Kubu Raya	30.720.900	0	14.629.000	14.629.000	-	16.091.900	30.720.900	100
8	1	05	1	10	Posko Pemilu	Terpenuhinya Posko Pemilihan Umum	53.703.400	0	0	0	-	0	0	0
9					PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Terwujudnya Prongram Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	74.614.670	7.954.000	29.002.700	29.002.700	365	31.902.970	68.859.670	92
9	1	05	1	1	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Terjadinya Laporan Movev Bansos/Hibah	34.709.000	7.954.000	10.000.000	10.000.000	126	11.000.000	28.954.000	83
9	1	05	1	2	Pembinaan Ormas LSM	Menjaga hubungan yang harmonis,saling pengertian,saling menghormati dan saling percaya di antara anggota masyarakat	19.952.835	0	9.501.350	9.501.350	-	10.451.485	19.952.835	100
9	1	05	1	3	Verifikasi Ormas/LSM Hibah Bansos	Terverifikasi Ormas/LSM Hibah Bansos	19.952.835	0	9.501.350	9.501.350	-	10.451.485	19.952.835	100
9	1	05	1	4	Sosialisasi dan Kordinasi Program bantuan Sosial	Terwujudnya sosialisasi dan Kordinasi Progtam bantuan Sosial	94.500.000	0	45.000.000	45.000.000	-	49.500.000	94.500.000	100
9	1	05	1	5	Fasilitasi dan pendampingan kemitraan, serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Terwujudnya Fasilitas dan pendampingan kemitraan, serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	16.800.000	0	8.000.000	8.000.000	-	8.800.000	16.800.000	100
9	1	05	1	6	Penataan pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan	Terwujudnya Penataan pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan	210.000.000	0	100.000.000	100.000.000	-	110.000.000	210.000.000	100
9	1	05	1	7	Bintek pengembangan organisasi kemasyarakatan	terwujudnya Bintek pengembangan organisasi kemasyarakatan	73.500.000	0	35.000.000	35.000.000	-	38.500.000	73.500.000	100
9	1	05	1	8	Rakernis Mediasi, pengawasan organisasi kemasyarakatan	Terwujudnya Rakernis Mediasi, pengawasan organisasi kemasyarakatan	73.500.000	0	35.000.000	35.000.000	-	38.500.000	73.500.000	100
9	1	05	1	9	Pematauan, Evaluasi dan pelaporan organisasi kemasyarakatan dan organisasi, kemasyarakatan asing	Terwujudnya Pematauan, Evaluasi dan pelaporan organisasi kemasyarakatan dan organisasi, kemasyarakatan asing	73.500.000	0	35.000.000	35.000.000	-	38.500.000	73.500.000	100
10					PROGRAM KEWASPADAAN DINI / DAERAH	Terwujudnya Prongram Kewaspadaan Dini di Daerah	1.000.562.055	149.376.100	342.939.550	342.939.550	230	377.233.505	869.549.155	87
10	1	05	1	1	Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi FKDM	Terwujudnya Peran dan Fungsi FKDM	143.575.950	25.184.450	40.000.000	40.000.000	159	44.000.000	109.184.450	76
10	1	05	1	2	Penanganan Konflik Social Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya	Terlaksananya Penanganan Konflik Social Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya	164.644.950	41.622.700	50.000.000	50.000.000	120	55.000.000	146.622.700	89
10	1	05	1	3	Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.	Terlaksananya Pembinaan Ketertiban Masyarakat	156.281.370	0	74.419.700	74.419.700	-	81.861.670	156.281.370	100
10	1	05	1	4	Rapat Rencana Aksi Tim Terpadu P4GN Kabupaten Kubu Raya	Terfasilitasinya Pencegahan Narkoba	124.755.680	0	44.215.800	44.215.800	-	48.637.380	92.853.180	74
10	1	05	1	5	Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Terlaksananya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan	135.258.980	42.405.800	44.215.800	44.215.800	104	48.637.380	135.258.980	100

					Kabupaten Kubu Raya	Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kabupaten Kubu Raya								
10	1	05	1	6	Implementasi Gerakan Revolusi Mental di Kabupaten Kubu Raya	Implementasi Gerakan Revolusi Mental	96.574.405	24.920.650	26.289.050	26.289.050	105	28.917.955	80.127.655	83
10	1	05	1	7	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Daerah Kabupaten Kubu Raya	Tersedianya Data Orang Asing	34.120.800	10.458.000	11.268.000	11.268.000	108	12.394.800	34.120.800	100
10	1	05	1	8	Fasilitasi Peran dan Fungsi KOMINDA	Terlaksananya Komida	25.473.900	0	0	0	-	0	0	0
10	1	05	1	9	Pembentukan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasioanal Revolusi Mental	Terlaksananya Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasioanal Revolusi Mental	95.615.520	0	45.531.200	45.531.200	-	50.084.320	95.615.520	100
10	1	05	1	10	Rapat Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing di Kabupaten Kubu Raya	Terlaksananya Pembinaan Ketertiban Masyarakat	0	0	0	0	-	0	0	-
11					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH	Terlaksananya Prongram Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Aparatur	24.260.500	4.784.500	7.000.000	7.000.000	146	7.700.000	19.484.500	80
11	4	01	1	1	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Terlaksannanya Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	12.058.000	2.450.000	3.500.000	3.500.000	143	3.850.000	9.800.000	81
11	4	01	1	2	Penyusunan Database E-Formasi	Terlaksannanya penyusunan Database E-Formasi	0	0	0	0	-	0	0	-
11	4	01	1	3	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Terlaksannanya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	0	0	0	0	-	0	0	-
11	4	01	1	4	Penyusunan Standar Pelayanan	Terlaksannanya Penyusunan Standar Pelayanan	0	0	0	0	-	0	0	-
11	4	01	1	5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksannanya Peningkatan Pelayanan Publik	12.202.500	2.334.500	3.500.000	3.500.000	150	3.850.000	9.684.500	79
12					PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Pengelolaan Keuangan daerah	41.203.000	0	0	0	-	0	0	0
12	4	04	1	1	Peningkatan Penataan Aset Pada SKPD	Terlaksananya peningkatan Penataan Aset pada SKPD	38.746.500	2.746.500	3.500.000	3.500.000	127	3.850.000	10.096.500	26
12	4	04	1	2	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	3.003.000	0	0	0	-	0	0	0
12	4	04	1	3	Bimbingan Teknis Manajemnt Pengolaan Aset Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	9.550.000	0	0	0	-	0	0	0
											-		0	-
8	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.614.626.129		2.688.886.341	2.688.886.341	-	2.925.739.788	5.614.626.129	100
8	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		33.383.274		8.453.614	8.453.614	-	24.929.660	33.383.274	100
8	01	2	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	4.399.720		696.160	696.160	-	4.399.720	5.095.880	116
8	01	2	01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.878.747		3.895.227	3.895.227	-	7.983.520	11.878.747	100
8	01	2	01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.144.240				-	4.144.240	4.144.240	100
8	01	2	01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.779.140		699.130	699.130	-	3.779.140	4.478.270	118
8	01	2	01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja	7.786.137		3.163.097	3.163.097	-	4.623.040	7.786.137	100

8	01	2	01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	4.581.592.423		2.164.890.526	2.164.890.526	-	2.416.701.897	4.581.592.423	100
8	01	2	01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.553.053.523		2.159.463.766	2.159.463.766	-	2.393.589.757	4.553.053.523	100
8	01	2	01	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.988.080		659.200	659.200	-	7.988.080	8.647.280	108
8	01	2	01	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.007.400		984.770	984.770	-	8.007.400	8.992.170	112
8	01	2	01	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	10.899.450		3.782.790	3.782.790	-	7.116.660	10.899.450	100
8	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		30.520.554				-	30.520.554	30.520.554	100
8	01	2	05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	13.406.554				-	13.406.554	13.406.554	100
8	01	2	05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	17.114.000				-	17.114.000	17.114.000	100
8	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		217.856.865		92.559.057	92.559.057	-	125.297.808	217.856.865	100
8	01	2	06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	86.490.945		45.453.057	45.453.057	-	41.037.888	86.490.945	100
8	01	2	06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.279.920		3.781.000	3.781.000	-	9.498.920	13.279.920	100
8	01	2	06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.643.000		2.575.000	2.575.000	-	4.068.000	6.643.000	100
8	01	2	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.443.000		40.750.000	40.750.000	-	70.693.000	111.443.000	100
8	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		125.021.593		100.127.740	100.127.740	-	24.893.853	125.021.593	100
8	01	2	07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.394.853		59.501.000	59.501.000	-	24.893.853	84.394.853	100
8	01	2	07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	40.626.740		40.626.740	40.626.740	-		40.626.740	100
8	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		522.815.120		274.820.404	274.820.404	-	247.994.716	522.815.120	100
8	01	2	08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.098.200		56.209.000	56.209.000	-	3.889.200	60.098.200	100
8	01	2	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	56.400.000		30.000.000	30.000.000	-	26.400.000	56.400.000	100
8	01	2	08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	260.187.500		130.000.000	130.000.000	-	130.187.500	260.187.500	100
8	01	2	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	146.129.420		58.611.404	58.611.404	-	87.518.016	146.129.420	100

8	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		103.436.300		48.035.000	48.035.000	-	55.401.300	103.436.300	100
8	01	2	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	74.066.300		37.005.000	37.005.000	-	37.061.300	74.066.300	100
8	01	2	09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.370.000		11.030.000	11.030.000	-	18.340.000	29.370.000	100
8	02				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		155.671.812		63.546.160	63.546.160	-	92.125.652	155.671.812	100
8	02	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		155.671.812		63.546.160	63.546.160	-	92.125.652	155.671.812	100
8	02	2	01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang paham tentang Kegiatan Penigkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Kebangsaan Jumlah Orang yang trampil tentang kegiatan Fasilitasi Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK)	155.671.812		63.546.160	63.546.160	-	92.125.652	155.671.812	100
8	03				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		2.165.253.828		1.028.281.484	1.028.281.484	-	1.136.972.344	2.165.253.828	100
8	03	2			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		2.165.253.828		1.028.281.484	1.028.281.484	-	1.136.972.344	2.165.253.828	100
8	03	2	01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang Yang Paham Pelaksanaan dan Fasilitasi Pendidikan Politik di Wilayah Kabupaten Kubu Raya Jumlah peserta dalam sosialisasi/fasilitasi Bantuan keuangan Partai Politik Jumlah peserta dalam sosialisasi/fasilitasi perizinan reklame non komersial	2.053.093.792		1.015.414.832	1.015.414.832	-	1.037.678.960	2.053.093.792	100
8	03	2	01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	Jumlah Orang Yang Paham Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya Politik di Kabupaten Kubu Raya	67.346.252		12.866.652	12.866.652	-	54.479.600	67.346.252	100

					dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
8	03	2	01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Monitoring yang mengikuti evaluasi pelaporan politik dalam negeri	44.813.784				-	44.813.784	44.813.784	100
8	04				PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		4.727.058.489		2.228.059.762	2.228.059.762	-	2.498.998.727	4.727.058.489	100
8	04	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		4.727.058.489		2.228.059.762	2.228.059.762	-	2.498.998.727	4.727.058.489	100
8	04	2	01	4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang Yang Paham Sosialisasi dan Koordinasi Program Bantuan Sosial/BANSOS	4.727.058.489		2.228.059.762	2.228.059.762	-	2.498.998.727	4.727.058.489	100
8	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		280.460.660		162.882.950	162.882.950	-	117.577.710	280.460.660	100
8	05	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		280.460.660		162.882.950	162.882.950	-	117.577.710	280.460.660	100
8	05	2	01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang paham tentang Kegiatan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FKUB) dan P4GN	280.460.660		162.882.950	162.882.950	-	117.577.710	280.460.660	100
8	06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		269.728.664		68.058.320	68.058.320	-	201.670.344	269.728.664	100
8	06	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		269.728.664		68.058.320	68.058.320	-	201.670.344	269.728.664	100
8	06	2	01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Presentase Penanganan Konflik Sosial Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya	92.836.012				-	92.836.012	92.836.012	100

8	01	2	02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16.810.910						0	0
8	01	2	02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	14.164.485						0	0
8	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0	-
8	01	2	05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							0	-
8	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		148.377.736						0	-
8	01	2	06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	86.981.337						0	0
8	01	2	06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16.848.860						0	0
8	01	2	06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.716.000						0	0
8	01	2	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.117.500						0	0
8	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		73.314.155						0	0
8	01	2	07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	73.314.155						0	0
8	01	2	07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0						0	0
8	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		254.510.576						0	-
8	01	2	08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.382.900						0	0
8	01	2	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	65.735.748						0	0
8	01	2	08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	327.806.250						0	0
8	01	2	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	129.067.325						0	0
8	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		63.886.648						0	0
8	01	2	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	94.467.908						0	0

					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
8	01	2	09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40.457.000						0	0
8	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							0	0
8	02				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		502.599.576						0	-
8	02	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		502.599.576						0	0
8	02	2	01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.220.999.927						0	0
8	02	2	01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	180.599.649						0	0
8	03				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		9.891.959.644						0	-
8	03	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		9.891.959.644						0	0
8	03	2	01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	20.158.277.901						0	0

						Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
8	03	2	01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	142.278.324						0	0
8	03	2	01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	124.600.786						0	0
8	04				PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		2.209.026.692						0	0
8	04	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		2.209.026.692						0	0
8	04	2	01	4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.690.821.139						0	0
8	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		127.038.224						0	0
8	05	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		127.038.224						0	0
8	05	2	01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	266.780.270						0	0

						Kepercayaan di Daerah									
8	06					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		129.202.382						0	0
8	06	2	01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		129.202.382						0	0
8	06	2	01	4		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	129.144.562						0	0
8	06	2	01	5		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	145.682.634						0	0
8	06	2	01	6		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							0	0

Berdasarkan tabel yang telah disajikan dapat dijabarkan bahwa pada kolom 11 Tidak semua tingkat capaian target Renstra bisa dipersentasekan karena tidak konsistennya kegiatan setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai 2022.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Urusan Pemerintahan Umum yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 – 2024, sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya sebagai lembaga penunjang yang membantu Kepala Daerah di bidang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Urusan Pemerintahan Umum telah di atur di dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kubu Raya. Pencapaian kinerja pelayanan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bankesbangpol
Kabupaten Kubu Raya

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Badan Kesbangpol				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	-	100%	100%	61,00%	64,50%	68,00%	100%	61,00%	64,50%	68,00%	
2	Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama.	-	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Jumlah Pembinaan Terhadap Kewaspadaan Dini/Daerah.	-	100%	1 Kegiat-tan.	1 Kegiat-tan	1 Kegiat-tan.	2 Kegiat-tan.	2 Kegiat-tan.	1 Kegiat-tan.	2 Kegiat-tan.	2 Kegiat-tan.	
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BANKESBANGPOL) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kubu Raya, mempunyai tugas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan Urusan Pemerintahan Umum.

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan, antara lain:

1. Masih terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga menghambat pencapaian tujuan bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Masih terbatasnya sumber daya manusia bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Kurang optimalnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan cakupan wilayah daerah yang luas.
4. Belum optimalnya pembinaan dan sosialisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait penunjang kelancaran otonomi daerah dalam melaksanakan kebijakan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan capaian Kinerja Bankesbangpol Kabupaten Kubu Raya dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, Bankesbangpol Kabupaten Kubu Raya akan menempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat untuk turut menjaga dan memelihara kondusivitas wilayah, misalnya melalui pemberdayaan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat);
2. Menyusun database kerawanan sosial untuk mengurangi potensi kerawanan sosial melalui peningkatan upaya preventif dan preventif;

3. Meningkatkan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan untuk menurunkan potensi konflik yang berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan);
4. Meningkatkan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik untuk menurunkan angka konflik politik serta mewujudkan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang berkualitas dengan mengarahkan pemilih menjadi pemilih yang cerdas dan rasional.

Selain permasalahan dan pemecahan permasalahannya, faktor-faktor yang berjalan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan yang ada di Bankesbangpol Kabupaten Kubu Raya antara lain:

- a. Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Bankesbangpol telah tertata dengan baik melalui Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kubu Raya. Dengan demikian, pegawai dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mekanisme dan aturan yang telah tersedia.
- b. Komitmen dan dedikasi pimpinan dan pegawai Bankesbangpol yang tinggi. Pimpinan dan seluruh pegawai Bankesbangpol mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan terutama untuk mendukung visi Kabupaten Kubu Raya yaitu Mewujudkan Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius.
- c. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan pegawai Bankesbangpol dan sesama pegawai Bankesbangpol. Pimpinan Bankesbangpol memiliki hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan staf/bawahannya (hubungan vertikal), begitu pula dengan sesama pegawai (hubungan horizontal). Rasa kebersamaan sebagai satu *team work* selalu dibina dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas pokok Bankesbangpol.
- d. Tingkat pendidikan pegawai Bankesbangpol yang cukup memadai. Sebagian besar pegawai Bankesbangpol berpendidikan strata 1 (S1) dan strata 2 (S2), kondisi ini memudahkan terjadinya transformasi

informasi dari berbagai sumber sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan berkualitas.

Sementara faktor-faktor di Bankesbangpol yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan tetapi tidak dimiliki oleh Bankesbangpol adalah:

- a. Kurangnya sumber daya aparatur pemerintah yang memadai dan handal di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kubu Raya seperti kepulauan, daerah terpencil dan daerah perbatasan yang menghambat akses Pemerintah Daerah untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat.
- c. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
- d. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata sehingga dapat menimbulkan munculnya potensi konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi dan pendidikan.
- e. Tuntutan masyarakat terhadap layanan informasi yang cepat, tepat dan akurat.
- f. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan berlaku yang mengatur perencanaan dan evaluasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Kubu Raya

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatn Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Presentase Tercaiapnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.140.173.482	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Presentase Tercaiapnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.140.173.482	
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Tercapainya Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dok. 8 Laporan	24.652.890	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Tercapainya Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dok. 8 Laporan	24.652.890	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	4.159.309	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	4.159.309	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	6.368.036	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	6.368.036	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	6.368.036	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	6.368.036	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dok	6.631.790	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dok	6.631.790	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.994.942	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.994.942	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.498.813	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.498.813	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22 Orang. 12 Laporan	2.575.431.477	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22 Orang. 12 Laporan	2.575.431.477	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Sui. Raya Kab. Kubu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.553.002.726	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Sui. Raya Kab. Kubu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.553.002.726	

	ASN	Raya				ASN	Raya				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	7.378.456	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	7.378.456	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	8.002.770	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	4 Laporan	8.002.770	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Laporan	7.047.525	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Laporan	7.047.525	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	24 Paket. 12 Dok. 4 Laporan	148.377.736	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	24 Paket. 12 Dok. 4 Laporan	148.377.736	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.436.836	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.436.836	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.987.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.987.900	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	3.648.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	3.648.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	96.305.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	96.305.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 unit	73.314.155	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 unit	73.314.155	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	73.314.155	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	73.314.155	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya			

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40 Laporan	254.510.576	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40 Laporan	254.510.576	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.990.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.990.800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	31.415.748	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	31.415.748	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	156.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	156.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	61.104.028	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	61.104.028	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit	63.886.648	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit	63.886.648	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.982.648	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.982.648	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	19.480.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	19.480.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Presentase Tercapainya Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100%	502.599.576	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Presentase Tercapainya Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100%	502.599.576	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksannnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	151 Orang	502.599.576	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksannnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	151 Orang	502.599.576	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	31 Orang	420.999.927	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	31 Orang	420.999.927	

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	120 Orang	81.599.649	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	120 Orang	81.599.649	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Presentase Tercapainya Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	9.891.959.644	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Presentase Tercapainya Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	9.891.959.644	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksanannya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik	30 Orang 1 Laporan	9.891.959.644	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksanannya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik	30 Orang 1 Laporan	9.891.959.644	
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Orang	9.599.179.953	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Orang	9.599.179.953	
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan	20 Orang	41.665.624	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan.	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik.	20 Orang	41.665.624	

	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	41.490.000	Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	41.490.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Presentase Tercapainya Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	2.209.026.692	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Presentase Tercapainya Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	2.209.026.692	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30 Orang	2.209.026.692	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30 Orang	2.209.026.692	
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 Orang	2.209.026.692	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 Orang	2.209.026.692	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Presentase Tercapainya Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya	100%	127.038.224	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Presentase Tercapainya Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya	100%	127.038.224	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	120 Orang	127.038.224	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	120 Orang	127.038.224	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi.	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di	120 Orang	127.038.224	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di	120 Orang	127.038.224	

	Sosial. Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Presentase Tercapainya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100%	129.202.382	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Presentase Tercapainya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100%	129.202.382	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksanannya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	30 Orang	129.202.382	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Terlaksanannya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	30 Orang	129.202.382	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerjasama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Orang	58.272.281	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerjasama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Orang	58.272.281	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerjasama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	18 Orang	70.930.101	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerjasama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di	Sui. Raya Kab. Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	18 Orang	70.930.101	

		Sui. Raya Kab. Kubu Raya				Daerah	Sui. Raya Kab. Kubu Raya				
	Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerjasama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah			Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerjasama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah			
Jumlah					16.000.000.000	Jumlah					16.000.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan urusan pemerintahan umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Bankesbangpol adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Bankesbangpol dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Tabel 2.4 Musrembang

No.	Usulan MUSREMBANG DAN POKIR	PELAKSANA

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kabupaten

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional, pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah **“Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana yang dijabarkan menjadi Prioritas Nasional yaitu:

1. Narasi RKP Tahun 2023 yang terdiri atas VI (enam) Bab yakni Pendahuluan, Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional, Tema dan Sasaran Pembangunan, Penjabaran 7 (tujuh) Prioritas Nasional dan Pendanaan, Kaidah Pelaksanaan, serta Penutup;
2. Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, dan alokasi pendanaannya serta instansi pelaksana;
3. Matriks Proyek Prioritas Strategis/Major Project yang memuat Proyek Prioritas Strategis/Major Project pada Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024, Visi dan Misi Bupati Kubu Raya adalah **“*Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius*”**, dengan misi yang mendukung terwujudnya visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2. Meningkatkan pelayanan publik di sektor mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
3. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang lebih berkeadilan dan bersandarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.
4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius di seluruh lapisan masyarakat.
5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Visi misi tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya.

Dengan melihat visi dan misi Bupati Kubu Raya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Kubu Raya antara lain :

1. Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Perumusan, Penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
4. Perumusan, penyiapan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dan pembinaan budaya politik, organisasi kemasyarakatan;

5. Perumusan, penyiapan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pencegahan dan manajemen konflik;
6. Perumusan, penyiapan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ketahanan Sosial Budaya;
7. Perumusan, penyiapan kebijakan pemantapan kewaspadaan, ketahanan dan ideologi bangsa;
8. Penyusunan program-program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Pembinaan kerukunan antar umat beragama;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
12. Pelaksanaan tugas administrasi perkantoran, kepegawaian, rumah tangga kantor dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Presentase nilai SAKIP	56,32%	58,66%	100%	61,00%	64,50%	68,00%
2.	Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama	Jumlah kasus konflik antar agama	Meningkatnya Kerukunan antara umat beragama	Jumlah kasus konflik antar agama	0	0	0	0	0	0

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bakesbangpol.

Sasaran Pertama : Meningkatnya Kinerja, Pelayanan dan Kapasitas aparatur.

Untuk mencapai Sasaran Tersebut Ditetapkan Program Dan Kegiatan Sebagai Berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sasaran Kedua : Meningkatnya Pemahaman Mengenai Wawasan Kebangsaan Untuk Menurunkan Potensi Konflik Yang Berbasis Sara.

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
 - Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

Sasaran Ketiga : Meningkatnya Pemahaman Tentang Peran Partai Politik Dilingkungan Kemasyarakatan.

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.

Sasaran Keempat : Meningkatnya Pemahaman Pentingnya Peran Lembaga Sosial Masyarakat Dan Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Kubu Raya.

1. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 - Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sasaran Kelima : Meningkatnya Pemahaman Pentingnya Kerukunan Umat Beragama, Budaya, Dan Sosial Di Kalangan Masyarakat Kubu Raya.

1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
 - Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

Sasaran Keenam : Meningkatnya Pemahaman Pentingnya Peran Kewaspadaan Dini Dan Penanganan Konflik Sosial.

1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Kubu Raya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Tercaipnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bakesbangpol KKR	100%	3.140.173.482	APBD KAB		100%	36.174.459
8	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakesbangpol KKR	13 Dok. 8 Laporan	24.652.890	APBD KAB		20 Dok. 8 Laporan	36.174.459
8	01	2	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bakesbangpol KKR	1 Dok	4.159.309	APBD KAB		4 Dok	4.575.240
8	01	2	01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bakesbangpol KKR	4 Dok	6.368.036	APBD KAB		4 Dok	7.004.840
8	01	2	01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bakesbangpol KKR	4 Dok	6.368.036	APBD KAB		4 Dok	4.558.664
8	01	2	01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bakesbangpol KKR	4 Dok	6.631.790	APBD KAB		4 Dok	7.073.734
8	01	2	01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bakesbangpol KKR			APBD KAB		4 Dok	4.119.821
8	01	2	01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bakesbangpol KKR	4 Laporan	2.994.942	APBD KAB		4 Laporan	3.756.816
8	01	2	01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakesbangpol KKR	4 Laporan	4.498.813	APBD KAB		4 Laporan	5.085.344
8	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bakesbangpol KKR	22 Orang. 12 Laporan	2.575.431.477	APBD KAB		25 Orang. 12 Laporan	2.992.480.284
8	01	2	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bakesbangpol KKR	22 Orang/bulan	2.553.002.726	APBD KAB		25 Orang/bulan	2.967.768.296

8	01	2	02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bakesbangpol KKR	4 Laporan	7.378.456	APBD KAB		4 Laporan	8.786.888
8	01	2	02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bakesbangpol KKR	4 Laporan	8.002.770	APBD KAB		4 Laporan	8.808.140
8	01	2	02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bakesbangpol KKR	4 Laporan	7.047.525	APBD KAB		4 Laporan	7.116.960
8	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bakesbangpol KKR			APBD KAB			
8	01	2	05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bakesbangpol KKR			APBD KAB			
8	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bakesbangpol KKR	24 Paket. 12 Dok. 4 Laporan	148.377.736	APBD KAB		24 Paket. 12 Dok. 4 Laporan	163.285.961
8	01	2	06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bakesbangpol KKR	12 Paket	41.436.836	APBD KAB		12 Paket	45.544.501
8	01	2	06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bakesbangpol KKR	12 Paket	6.987.900	APBD KAB		12 Paket	9.860.960
8	01	2	06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bakesbangpol KKR	12 Dok	3.648.000	APBD KAB		12 Dok	4.068.000
8	01	2	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bakesbangpol KKR	4 Laporan	96.305.000	APBD KAB		4 Laporan	103.812.500
8	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bakesbangpol KKR	3 unit	73.314.155	APBD KAB			
8	01	2	07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bakesbangpol KKR	3 Unit	73.314.155	APBD KAB			
8	01	2	07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Bakesbangpol KKR			APBD KAB			
8	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol KKR	40 Laporan	254.510.576	APBD KAB		40 Laporan	280.481.647
8	01	2	08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bakesbangpol KKR	12 Laporan	5.990.800	APBD KAB		12 Laporan	6.392.100
8	01	2	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bakesbangpol KKR	4 Laporan	31.415.748	APBD KAB		4 Laporan	34.320.000
8	01	2	08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Bakesbangpol	12 Laporan	156.000.000	APBD KAB		12 Laporan	171.806.250

						Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KKR						
8	01	2	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bakesbangpol KKR	12 Laporan	61.104.028	APBD KAB		12 Laporan	67.963.297
8	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol KKR	2 Unit	63.886.648	APBD KAB		2 Unit	70.462.260
8	01	2	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bakesbangpol KKR	1 Unit	44.982.648	APBD KAB		1 Unit	49.485.260
8	01	2	09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bakesbangpol KKR	1 Unit	19.480.000	APBD KAB		1 Unit	20.977.000
8	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bakesbangpol KKR			APBD KAB			
8	02				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Tercapainya Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol KKR	100%	502.599.576	APBD KAB		100%	899.000.000
8	02	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksannnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol KKR	151 Orang	502.599.576	APBD KAB		151 Orang	899.000.000
8	02	2	01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bakesbangpol KKR	31 Orang	420.999.927	APBD KAB		31 Orang	800.000.000
8	02	2	01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bakesbangpol KKR	120 Orang	81.599.649	APBD KAB		120 Orang	99.000.000
8	03				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Tercapainya Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bakesbangpol KKR	100%	9.891.959.644	APBD KAB		100%	10.742.821.434
8	03	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Terlaksannnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	Bakesbangpol KKR	30 Orang 1 Laporan	9.891.959.644	APBD KAB		30 Orang 1 Laporan	10.742.821.434

					Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik							
8	03	2	01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bakesbangpol KKR	10 Orang	9.599.179.953	APBD KAB		10 Orang	10.559.097.948
8	03	2	01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bakesbangpol KKR	20 Orang	41.665.624	APBD KAB		20 Orang	100.612.700
8	03	2	01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bakesbangpol KKR	1 Laporan	41.490.000	APBD KAB		1 Laporan	83.110.786
8	04				PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Tercapainya Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol KKR	100%	2.209.026.692	APBD KAB		100%	2.481.794.447
8	04	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol KKR	30 Orang	2.209.026.692	APBD KAB		30 Orang	2.481.794.447
8	04	2	01	4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang	Bakesbangpol KKR	30 Orang	2.209.026.692	APBD KAB		30 Orang	2.481.794.447

					Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
8	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase Tercapainya Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya	Bakesbangpol KKR	100%	127.038.224	APBD KAB		100%	139.742.046
8	05	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	Bakesbangpol KKR	120 Orang	127.038.224	APBD KAB		120 Orang	139.742.046
8	05	2	01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bakesbangpol KKR	120 Orang	127.038.224	APBD KAB		120 Orang	139.742.046
8	06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase Tercapainya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol KKR	100%	129.202.382	APBD KAB		100%	145.624.814
8	06	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		30 Orang	129.202.382	APBD KAB		30 Orang	145.624.814
8	06	2	01	4	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah		12 Orang	58.272.281	APBD KAB		12 Orang	70.872.281
8	06	2	01	5	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitas Kelembagaan Bidang		18 Orang	70.930.101	APBD KAB		18 Orang	74.752.533

						Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah							
8	06	2	01	6	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah				APBD KAB			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran Bakesbangpol Tahun 2023
Kabupaten Kubu Raya

No.	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.140.173.482	APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.652.890	APBD
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.159.309	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.368.036	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.368.036	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.631.790	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		APBD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.994.942	APBD
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.498.813	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.575.431.477	APBD
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.553.002.726	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.378.456	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.002.770	APBD
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.047.525	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148.377.736	APBD
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41.436.836	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.987.900	APBD
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.648.000	APBD
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	96.305.000	APBD
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		APBD
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.314.155	APBD
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.314.155	APBD
2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.510.576	APBD
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.990.800	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.415.748	APBD
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.000.000	APBD
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.104.028	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.886.648	APBD
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.982.648	APBD
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.480.000	APBD
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		APBD
			APBD
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	502.599.576	APBD
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	502.599.576	APBD
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	420.999.927	APBD
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	81.599.649	APBD
			APBD
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	9.891.959.644	APBD
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	9.891.959.644	APBD
1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	9.599.179.953	APBD
2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	41.665.624	APBD
3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	41.490.000	APBD
			APBD
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.209.026.692	APBD
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.209.026.692	APBD
1	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.209.026.692	APBD
			APBD
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	127.038.224	APBD

No.	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	127.038.224	APBD
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	127.038.224	APBD
			APBD
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	129.202.382	APBD
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	129.202.382	APBD
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70.930.101	APBD
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		APBD
3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		APBD

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2023. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara umum dan Bappeda secara khusus maka Renja Bankesbangpol disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Kubu Raya dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya.

Substansi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dengan mempedomani Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.

3. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Kami berharap, bahwa Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh targetan indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian, dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUBU RAYA

TH.C. LEDYDIANTO, S.Ip. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630623 198503 1 010